

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Manajemen Strategik

Istilah Strategik berasal dari bahasa Yunani *stratogos*, yang berarti seni atau ilmu para jenderal dalam memenangkan pertempuran dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Sementara itu, menurut Muhammad Abdul Muhyi, Strategi memiliki makna yang lebih luas yang dikenal dengan konsep *Five P's*, yaitu:

- a. Strategi sebagai suatu perencanaan (*plan*),
- b. Strategi sebagai taktik atau siasat (*ploy*),
- c. Strategi sebagai pola tindakan (*pattern*),
- d. Strategi sebagai posisi dalam persaingan (*position*), dan
- e. Strategi sebagai cara pandang atau persepsi (*perception*).

Manajemen pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan tenaga kerja (*staffing*), pengoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*) terhadap pekerjaan orang lain guna mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Manajemen sering pula diartikan sebagai fungsi utama seorang manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Dengan demikian, manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses, yakni cara atau metode yang sistematis untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen merupakan proses yang menekankan keterlibatan aktif

serta keterkaitan antaraktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

Manajemen Strategi adalah suatu proses di mana perusahaan atau organisasi merumuskan serta melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Proses perumusan strategi dilakukan secara cermat melalui berbagai tahapan yang saling berkaitan, seperti penetapan tujuan jangka panjang, perumusan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, hingga pemilihan alternatif strategi yang tepat. Dengan perencanaan yang matang tersebut, diharapkan pelaksanaan strategi dapat berjalan sesuai harapan dan mampu mewujudkan visi serta misi perusahaan.²⁸

a. Manajemen Strategik Menurut Ahli

- 1) Menurut Fred R. David, Manajemen Strategik merupakan seni sekaligus ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Menurut Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, dan Robert E. Hoskisson, Manajemen Strategi merupakan suatu proses yang membantu organisasi dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta menetapkan cara terbaik untuk memperoleh hasil yang bernilai.
- 3) Menurut Michael Polter, Manajemen Strategik merupakan hal yang menjadikan perusahaan sebagai satu kesatuan yang lebih besar daripada sekadar gabungan dari bagian-bagiannya, sehingga di dalamnya tercipta unsur sinergi.

²⁷ Efri Novianto, *Manajemen Strategis*, 1st edn (Deepublish, 2020).

²⁸ Roni Angger Pratama, *Manajemen Strategi* (AE Publishing, 2023).

- 4) Menurut H. Igor Ansoff, Manajemen Strategik merupakan suatu analisis yang rasional mengenai bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam menghadapi ancaman maupun memanfaatkan peluang yang muncul dalam setiap kegiatannya.²⁹
 - 5) Menurut Arnoldo C. Hax dan Nicholas S. Majluf, Manajemen Strategik merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pentingnya keterpaduan yang kuat antara strategi bisnis dan struktur organisasi agar perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan.³⁰
- b. Tugas Manajemen Strategik
- Menurut Pearce dan Robinson, Manajemen Mstrategi mencakup delapan tugas utama, yaitu:
- 1) Merumuskan visi organisasi yang berisi pernyataan umum mengenai tujuan, filosofi, dan sasaran perusahaan.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap kondisi internal untuk mengetahui situasi serta kemampuan yang dimiliki perusahaan.
 - 3) Menganalisis faktor-faktor eksternal yang meliputi tingkat persaingan dan kondisi lingkungan umum.
 - 4) Menilai berbagai alternatif strategi organisasi dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan sumber daya internal.
 - 5) Menentukan pilihan strategi yang paling sesuai dengan tujuan organisasi.

²⁹ & Hadita Sudiantini, D., 'Manajemen Strategi', *CV. Pena Persada*, 2022, pp. 1–198 <https://fitk.iainambon.ac.id/mpi/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Manajemen-Strategi_LANTIP.pdf>.

³⁰ Tri Fenny Ramadani and others, 'Eksplorasi Konsep Dan Model Kepemimpinan Dalam Manajemen Strategik', *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2.2 (2024), pp. 243–64, doi:10.69693/ijim.v2i2.135.

- 6) Menetapkan rencana induk serta sasaran jangka panjang perusahaan.
- 7) Menyusun rencana tahunan dan sasaran jangka pendek yang selaras dengan rencana strategis jangka panjang.
- 8) Mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dalam penerapan strategi, dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan sistem penghargaan.³¹

Model komprehensif manajemen strategik mencakup seluruh tahapan dalam proses manajemen strategi, mulai dari analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, hingga tahap evaluasi dan pengendalian. Model ini melibatkan berbagai komponen penting seperti analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman), identifikasi peluang serta tantangan pasar, perumusan visi dan misi organisasi, hingga penentuan strategi kompetitif yang paling sesuai, baik melalui diferensiasi, efisiensi biaya, maupun strategi fokus.³²

c. Manfaat Manajemen Strategik

Menurut Wahyudi, penerapan manajemen strategik memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi atau perusahaan.

Di antaranya adalah:

- 1) Menentukan arah jangka panjang yang menjadi pedoman organisasi;

³¹ Dkk Mukhlis yunus, *Manajemen Strategi*, ed. by muhammad Hadian Utama Maulizar. (2024).

³² Dkk Rineliana., *Manajemen Strategik*, ed. by Puput tri Cahyono, 1st edn (Yayasan Cendekia Mulia mandiri, 2025).

- 2) Membantu perusahaan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal;
- 3) Meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan;
- 4) Mengidentifikasi keunggulan bersaing organisasi dalam kondisi lingkungan yang penuh risiko;
- 5) Memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi dan mencegah munculnya permasalahan di masa mendatang;
- 6) Mendorong keterlibatan karyawan dalam proses perumusan strategi sehingga menumbuhkan motivasi dalam pelaksanaannya;
- 7) Mengurangi terjadinya duplikasi atau tumpang tindih kegiatan;
- 8) Menurunkan resistensi terhadap perubahan di kalangan karyawan lama.³³

2. Analisis SWOT

a. Analisis SWOT Menurut Ahli

- 1) Menurut Santono analisis SWOT merupakan proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi yang diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Analisis ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), sekaligus meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) serta ancaman (*threats*).
- 2) Menurut Sthepen, analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang berlandaskan pada identifikasi kekuatan (*strengths*),

³³ Jean-marie Tremblay and others, *MANAJEMEN STRATEGIK, Educacao e Sociedade*, 2016, 1 <http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf>http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm>http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf><http://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>>.

kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), serta ancaman (*threats*).³⁴

- 3) Menurut Preddy Rangkuti, SWOT merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode ini dipandang sebagai strategi yang paling praktis dalam meningkatkan kinerja agar selaras dengan target yang diharapkan.
- 4) Menurut Poerwadarminta W.J.S, analisis dapat dimaknai sebagai proses menguraikan suatu pokok persoalan ke dalam berbagai bagian, kemudian menelaah bagian-bagian tersebut beserta keterkaitannya, sehingga diperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh.³⁵
- 5) Menurut Hartono, menjelaskan bahwa SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta peluang eksternal dan tantangan yang dihadapi.³⁶

b. Tujuan Analisis SWOT

Menurut Bilung, analisis SWOT memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengenali berbagai faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh, baik secara positif maupun negatif. Tujuan utama dari analisis ini adalah membantu perusahaan memahami secara menyeluruh seluruh elemen yang dapat memengaruhi proses perencanaan strategi dan pengambilan

³⁴ Edi Suarto, 'Pengembangan Objek Wisata Berdasarkan Analisis Swot', 2019, pp. 19–24.

³⁵ Sodikin Sodikin and Septi Gumindari, 'Analisis SWOT Mutu Evaluasi Pembelajaran', *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6.1 (2022), doi:10.26740/jdmp.v6n1.p59-69.

³⁶ Adhitya Imanuel Wulannata, 'Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20.1 (2017), pp. 133–44.

keputusan, yang penerapannya dapat digunakan pada hampir seluruh bidang industri.

Menurut Jogiyanto, tujuan analisis SWOT antara lain adalah:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kondisi internal dan eksternal yang menjadi masukan dalam perancangan proses, agar proses tersebut dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien.
- 2) Menganalisis situasi yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana untuk tindakan tertentu.
- 3) Mengetahui keunggulan atau keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan.
- 4) Menilai prospek perusahaan dalam hal penjualan, profitabilitas, serta pengembangan produk yang dihasilkan.
- 5) Mempersiapkan perusahaan agar mampu menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul.
- 6) Mempersiapkan perusahaan dalam mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan yang muncul dalam proses perencanaan dan pengembangan di masa depan.³⁷

3. Analisis SWOT Dalam Ekonomi syariah.

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan salah satu metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja suatu entitas. Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, penerapan analisis SWOT tidak hanya berfokus pada aspek bisnis konvensional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi

³⁷ Tuti Fitri Anggreani, 'Factors Influencing SWOT: Human Resource Development Strategy, Business Strategy, and MSDM Strategy (a Literature Review Study on Human Resource Management).', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.5 (2021), pp. 619–29.

moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an.

Analisis SWOT Syariah merupakan pengembangan dari analisis SWOT konvensional (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dipadukan dengan nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam (syariah), seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), kejujuran (shidq), amanah, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Analisis ini tidak hanya menilai faktor strategis organisasi, tetapi juga memastikan kesesuaian strategi dengan nilai-nilai syariah.³⁸

Komponen Analisis SWOT Syariah meliputi:

a. *Strengths* (Kekuatan) dalam Perspektif Syariah

Kekuatan merupakan faktor internal yang mendukung penerapan prinsip syariah, seperti produk halal, penggunaan akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah), transparansi transaksi, kompetensi sumber daya manusia dalam fiqh muamalah, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Dalam perspektif Islam, kekuatan usaha harus memberikan kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat.³⁹

b. *Weaknesses* (Kelemahan) dalam Perspektif Syariah

Kelemahan adalah faktor internal yang menghambat penerapan prinsip syariah, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta belum optimalnya sistem operasional syariah. Dalam Islam, kelemahan harus diperbaiki untuk mewujudkan keadilan dan keberkahan usaha.⁴⁰

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 1st edn (Gema Insani Press, 2001).

³⁹ Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*.

⁴⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

c. *Opportunities* (Peluang) dalam Perspektif Syariah

Peluang merupakan faktor eksternal yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, seperti mayoritas penduduk muslim, meningkatnya kesadaran halal, dukungan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi digital, dan tren global keuangan syariah. Islam mendorong umat untuk memanfaatkan peluang secara halal dan produktif.⁴¹

d. *Threats* (Ancaman) dalam Perspektif Syariah

Ancaman merupakan faktor eksternal yang menghambat sistem ekonomi syariah, seperti persaingan dengan lembaga konvensional, rendahnya literasi masyarakat, persepsi biaya tinggi, perubahan kebijakan, serta krisis ekonomi. Dalam Islam, ancaman harus dihadapi dengan strategi yang etis dan tidak melanggar prinsip syariah.⁴²

4. Analisis Lingkungan

Menurut Purnomo dan Zulkieflimansyah, analisis lingkungan merupakan tahap awal dalam manajemen strategis yang bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi kondisi lingkungan perusahaan, baik faktor internal maupun eksternal, yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.⁴³

a. Faktor Internal

Faktor internal berperan dalam membentuk kekuatan dan kelemahan (*strengths and weaknesses*) perusahaan. Faktor ini berkaitan dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan dan turut

⁴¹ Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 99.

⁴² 'Usmānī, M. T. (2002). An introduction to Islamic finance.

⁴³ Elsa Dian Prastiti, Iis Mariam, and Ernita Siambaton, 'Analisis Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Dalam Strategi Pengembangan Bisnis Pada Pt Esa Jaya Global', *Epigram*, 15.2 (2019), doi:10.32722/epi.v15i2.1241.

memengaruhi proses pengambilan keputusan manajerial. Faktor internal mencakup berbagai aspek manajemen fungsional, seperti pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, serta budaya organisasi. Analisis terhadap lingkungan internal sering disebut sebagai analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, analisis kapabilitas dan budaya organisasi, atau juga dikenal sebagai analisis jati diri perusahaan.⁴⁴

Lingkungan internal merupakan bagian dari organisasi yang berada dalam struktur perusahaan itu sendiri dan biasanya memiliki dampak langsung serta spesifik terhadap jalannya jalannya perusahaan. Analisis terhadap lingkungan internal ini merupakan bagian dari proses perencanaan strategi perencanaan strategi yang bertujuan untuk berbagi aspek seperti pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan, kegiatan produksi dan operasional, sumber daya manusia serta aspek keuangan akutansi.⁴⁵

Dalam menganalisis lingkungan internal, terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah sumber daya perusahaan. Sumber daya ini mencakup segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, seperti sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, serta riset dan pengembangan. Untuk menciptakan dan

⁴⁴ Ibnu Rochman, 'AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan Analisis SWOT Dalam Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Islam Yogyakarta) AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan', *Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.1 (2019), pp. 36–52.

⁴⁵ Rino Ariyanto Akhmad, Atin Chusniyah, and Heldy Ramadhan Putra, 'Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal', *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.2 (2023), pp. 88–92, doi:10.55904/nautical.v2i2.690.

mempertahankan keunggulan bersaing, manajemen harus mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya tersebut agar menghasilkan kemampuan yang menjadi dasar dari kompetensi inti perusahaan. Sumber daya perusahaan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya berwujud dan tidak berwujud.⁴⁶

Dalam konteks kebijakan pupuk subsidi, lingkungan internal meliputi faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem kebijakan, seperti:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dan paling vital dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Melalui kemampuan, keterampilan, dan kualitas yang dimiliki para pekerja, perusahaan dapat berjalan dan berkembang secara efektif serta terarah menuju sasaran yang telah ditetapkan.⁴⁷

Sumber daya manusia adalah komponen kunci dan paling penting dalam mewujudkan tujuan sebuah perusahaan. Dengan kompetensi, keahlian, serta mutu yang dimiliki oleh para karyawan, perusahaan mampu beroperasi dan berkembang secara optimal untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dan paling berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Melalui kemampuan, keterampilan, dan kualitas yang dimiliki setiap karyawan, perusahaan dapat berjalan, berkembang, dan

⁴⁶ Akhmad, Chusniyah, and Putra, '*Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal*'.

⁴⁷ Mutiara S. Panggabean, '*Manajemen Sumber Daya Manusia In Manajemen Sumber Daya Manusia*', *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*, 2018, p. 391.

mencapai sasaran secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴⁸

Menurut Akilah, sumber daya manusia mencakup setiap individu yang bekerja atau memiliki pekerjaan, baik itu pekerja, pegawai, maupun karyawan dalam suatu organisasi atau lembaga.

Menurut Anggerwati, sumber daya manusia adalah komponen terpenting dalam organisasi dibandingkan dengan sumber daya lainnya seperti modal atau teknologi, karena manusialah yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan berbagai faktor tersebut.⁴⁹

2) Mekanisme Distribusi Pupuk

Dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk, pemerintah membentuk sistem distribusi pupuk nasional yang mengatur alur penyaluran dari produsen hingga sampai ke petani melalui empat tingkatan, yaitu Lini I, II, III, dan IV

- a) Lini I merupakan gudang yang berada di area pabrik (untuk pupuk produksi dalam negeri) atau di pelabuhan tujuan (untuk pupuk impor).
- b) Lini II mencakup gudang yang berlokasi di ibu kota provinsi serta Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di sekitar wilayah pelabuhan.

⁴⁸ Sedarmayanti, 'Penulis Adalah Kasubbag Keuangan Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. □ 113', *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 17 no 31.31 (2007), pp. 113–24 <<http://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/19>>.

⁴⁹ Desi Kristanti and others, *Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara, 2023.

- c) Lini III adalah gudang milik distributor atau produsen yang terletak di kabupaten/kota dan telah ditetapkan oleh produsen.
- d) Lini IV adalah gudang pengecer atau kios yang telah ditunjuk oleh distributor.

Karena kepemilikan pupuk dari Lini I hingga Lini III masih berada di tangan produsen, maka pihak yang terlibat dalam rantai distribusi ini hanya mencakup produsen, distributor, dan pengecer.⁵⁰

3) Kualitas dan Ketersediaan Pupuk

Kualitas pupuk sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi petani maka pengawasan terhadap kualitas pupuk harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Suriadikarta, dkk, pengawasan terhadap kualitas pupuk sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan serta memastikan bahwa mutu pupuk sesuai dengan keterangan yang tercantum pada label atau kemasannya. Maka Pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di setiap kabupaten dan kota sebagai lembaga yang bertugas mengawasi peredaran serta mutu pupuk di lapangan. Komisi ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk pihak kepolisian, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.⁵¹

⁵⁰ Wayan R Susila, 'Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali', Jurnal Litbang Pertanian, 29.2 (2010), pp. 43–49.

⁵¹ Laurensius Tobing and Maylani Lucky, 'Studi Kualitas Pupuk Nitrogen (N), Fosfor (P) Dan Kalium (K) Yang Dijual Di Beberapa Toko Pertanian Di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau (Study On The Quality Of Nitrogen (N), Phosphorus (P) And Potassium (K) Fertilizers Sold In Some Agricultural', Jurnal Agroqua, 22.2 (2024), pp. 48–54

Salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan hasil produksi pertanian adalah ketersediaan pupuk di pasar, karena manfaat penggunaannya dapat dirasakan secara langsung oleh petani, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, proses pengadaan dan distribusi pupuk perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat memenuhi kebutuhan petani dengan baik. guna memastikan pengadaan dan distribusi pupuk berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan penerapan sistem manajemen yang baik.

Menurut Abdu, H. L., Hanan, dan Bauer, Michael A. seiring dengan meningkatnya ketersediaan serta kompleksitas sistem terdistribusi, muncul kebutuhan yang lebih besar akan solusi yang dapat mempermudah pengelolaan sistem tersebut.⁵²

4) Manajemen Pendataan (RDKK)

RDKK pupuk merupakan dokumen yang memuat data petani penerima pupuk bersubsidi, termasuk nama, alamat, luas lahan yang dikelola (sesuai ketentuan maksimal 2 hektar), serta rincian kebutuhan pupuk bersubsidi untuk setiap musim tanam, yaitu musim tanam pertama, kedua, dan ketiga dalam satu tahun. Adapun RDKK merupakan singkatan dari “Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok”. Dokumen ini disusun oleh ketua kelompok tani dengan pendampingan dari petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) di wilayah masing-masing.

Ketepatan dalam penyusunan RDKK yang disesuaikan dengan potensi dan rencana tanam di setiap desa maupun kecamatan sangat berperan penting dalam menentukan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.

⁵² Indriasari and Sani, ‘*Pengendalian Manajemen Pupuk Subsidi*’.

Proses penetapan alokasi pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

- a) Kelompok tani bersama petugas pendamping menyusun RDKK, yaitu dokumen yang memuat data petani penerima pupuk subsidi, seperti nama, alamat, luas lahan (dengan batas maksimal 2 hektar sesuai ketentuan), serta kebutuhan pupuk bersubsidi untuk musim tanam pertama, kedua, dan ketiga dalam satu tahun.
 - b) Dinas Pertanian Kabupaten kemudian mengumpulkan dan merekap seluruh usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang tercantum dalam RDKK, untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian RI.
 - c) Kementerian Pertanian RI menetapkan besaran alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah, sehingga tidak seluruh usulan yang diajukan melalui RDKK dapat dipenuhi sepenuhnya.⁵³
- 5) Pengawasan dan Transparansi

Menurut Mukarom & Laksana Pengawasan adalah proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi guna memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga mencakup pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan korektif agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan serta menjamin seluruh kegiatan

⁵³ Mitalom.com, 'Apa Itu E-RDKK? Inilah Fungsi Dan Manfaat RDKK Pupuk Subsidi 2021' (Mitalom.com, 2021) <<https://mitalom.com/artikel/5972/apa-itu-e-rdkk-inilah-fungsi-dan-manfaat-rdkk-pupuk-subsidi-2021>>.

berjalan secara efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.⁵⁴

Menurut Mardiasmo, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk sebagai pengawas untuk memantau dan menilai secara langsung kinerja pemerintah. Pengawasan juga diartikan sebagai upaya pihak luar untuk meninjau dan memahami secara langsung pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan, guna memastikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum.

Menurut Mahmudi, Transparansi merupakan bentuk pelayanan publik yang bersifat terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Informasi tersebut harus tersedia secara memadai serta disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami.

Menurut Mardiasmo, Transparansi adalah sikap terbuka pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya, terutama informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya public.⁵⁵

Dengan kata lain, faktor internal menentukan seberapa efektif kebijakan subsidi pupuk dapat dilaksanakan untuk mendukung kesejahteraan petani.

⁵⁴ Renita Kushartiningsih and Ikhsan Budi Riharjo, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.3 (2021), pp. 1–18.

⁵⁵ Andreani Avellyni Leda Making, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.10 (2021), pp. 1–15

b. Faktor Eksternal

Menurut Duncan, lingkungan eksternal perusahaan (*external business environment*) mencakup berbagai faktor di luar organisasi yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan ketika mengambil keputusan. Sementara itu menurut Chuck Williams, lingkungan eksternal perusahaan mencakup semua peristiwa di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi jalannya kegiatan perusahaan. Dan menurut Pearce II dan Robinson, lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang memengaruhi keputusan terkait arah dan tindakan perusahaan, yang pada gilirannya juga berdampak pada struktur organisasi serta proses internalnya.⁵⁶

Dalam konteks kebijakan pupuk subsidi, lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor yang berada di luar sistem kebijakan, seperti:

1) Fluktuasi Harga Bahan Baku Pupuk Di Pasar Global

Fluktuasi harga bahan baku pupuk di pasar global dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geopolitik dan harga energi, hingga kebijakan perdagangan dan permintaan dari sektor pertanian. Harga pupuk dunia telah menunjukkan volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan kenaikan tajam pada 2022 dan penurunan pada 2023, serta adanya fluktuasi yang terus terjadi.

Dalam satu tahun terakhir (2021-2022) harga pupuk mengalami lonjakan cukup tinggi mencapai 125%, akibat

⁵⁶ Putu Rani Susanthi, 'Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Dalam Mencapai Tujuan Perusahaan (Studi Kasus Stie Galileo Batam)', Jurnal Elektronik REKAMAN, 1.1 (2017), pp. 30–42.

kenaikan harga bahan baku pupuk, gas alam dan batuan fosfat yang dipicu oleh pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan pembatasan ekspor negara produsen pupuk.⁵⁷

Kebijakan pembatasan ekspor pupuk sejumlah negara produsen utama menyebabkan berkurangnya pasokan pupuk global. Misalnya China melakukan kebijakan pembatasan ekspor pupuk untuk mengamankan ketersediaan pupuk hingga Desember 2022, sehingga menyebabkan kontraksi pasokan pasar global berkurang masing-masing 10,6% pupuk N, 11,4% pupuk P dan 1,2% pupuk K.

Krisis pupuk global berdampak langsung terhadap peningkatan harga pupuk domestik. Harga pupuk non-subsidi jenis urea naik dari Rp 5.000–8.000 per kg (2021) menjadi Rp 13.000–15.000 per kg (2022). Kenaikan harga pupuk dunia dan domestik berpengaruh terhadap situasi pupuk subsidi karena anggaran tetap, volume pupuk subsidi yang disediakan anjlok sebagai dampak melambungnya harga bahan baku pupuk dan energy.⁵⁸

2) Kondisi Ekonomi dan Fiskal Pemerintah

Kondisi ekonomi pemerintah menggambarkan keadaan makroekonomi suatu negara yang meliputi:

- a) pertumbuhan ekonomi (PDB)
- b) tingkat inflasi
- c) pengangguran
- d) neraca perdagangan

⁵⁷ Joko Mulyono, Muhrizal Sarwani, and Sumardjo Gatot Irianto, 'Global Fertilizer Crisis: The Impact on Indonesia', *Jurnal Analis Kebijakan*, 7.1 (2023), pp. 29–47, doi:10.37145/jak.v7i1.560.

⁵⁸ Ibid., h.40-41.

e) Stabilitas Moneter

Dalam konteks pemerintahan, kondisi ekonomi mencerminkan kemampuan negara untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mankiw, kondisi ekonomi suatu negara ditentukan oleh tingkat output nasional, inflasi, dan pengangguran yang menunjukkan seberapa baik perekonomian bekerja dalam jangka pendek dan panjang.⁵⁹

Kondisi fiskal pemerintah adalah keadaan keuangan negara yang mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu periode anggaran.

Artinya, kondisi fiskal menunjukkan sehat atau tidaknya keuangan publik, serta kemampuan pemerintah untuk:

- a) Membiayai belanja negara (seperti subsidi, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dll.)
- b) Mengelola defisit atau surplus anggaran, dan
- c) Menjaga rasio utang terhadap PDB agar tetap aman.

Menurut Kementerian Keuangan RI (APBN 2025), kondisi fiskal diartikan sebagai gambaran kapasitas pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara guna mencapai tujuan pembangunan nasional.⁶⁰

3) Perkembangan Teknologi Pertanian

Perkembangan teknologi pertanian di Indonesia sudah semakin maju dan dikendalikan oleh Kementerian Pertanian

⁵⁹ I N This Chapter, 'Of Principles'.

⁶⁰ kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan RI, 'Kondisi Ekonomi Dan Fiskal Indonesia 2025.' (APBN Kita, 2025) <kemenkeu.go.id>.

(KEMENTAN) untuk mempercepat arus informasi teknologi budidaya, masa tanam, sistem produksi, dan masa panen. Kemajuan teknologi berdampak pada perubahan sistem pertanian, perilaku sosial, nilai, dan budaya masyarakat.

Kehadiran teknologi tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kebutuhan manusia. Teknologi berperan sebagai sarana untuk membantu manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari guna meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, kemajuan teknologi terus berkembang seiring waktu, karena sebagai alat bantu, teknologi harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Perkembangan teknologi tidak dapat terlepas dari respon masyarakat, karena setiap inovasi baru harus mampu berinteraksi dengan teknologi yang sudah ada serta menarik minat masyarakat untuk mau beradaptasi dan menggunakannya. Agar dapat diterima, teknologi modern perlu menunjukkan berbagai keunggulan, seperti kecanggihan, kemudahan, dan manfaat yang ditawarkan.

Secara umum, proses perkembangan teknologi dapat dipahami melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output (LMS SPADA, n.d.).

- a) Input mencakup berbagai sumber atau bahan yang akan digunakan dalam tahap pengolahan.
- b) Proses adalah tahap di mana input diolah atau dirancang menjadi suatu produk, sehingga memperoleh nilai tambah melalui metode atau teknik tertentu.

- c) Output merupakan hasil akhir dari proses tersebut, yakni produk yang telah diberi nilai dan siap digunakan. Output ini nantinya dapat kembali dimanfaatkan dalam proses berikutnya sebagai bagian dari sistem yang saling terintegrasi dan berkesinambungan.⁶¹

4) Kebijakan Perdagangan dan Pangan Nasional

Kebijakan perdagangan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di dalam negeri. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekspor dan impor harus disusun secara seimbang agar tidak mengganggu produksi domestik. Dokumen tersebut menegaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional memengaruhi kondisi pangan nasional karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan tertentu.

Arah kebijakan perdagangan pemerintah seharusnya diarahkan untuk melindungi petani dan konsumen, misalnya dengan mengendalikan impor pada masa panen raya dan memberikan insentif ekspor ketika produksi berlebih. Dengan demikian, kebijakan perdagangan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat pengendali keseimbangan pasar pangan nasional yang berkelanjutan.⁶²

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

⁶¹ Moh Ajib and Ahmad Habiburrahman Aksa, 'Dampak Perkembangan Teknologi Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Petani', *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1.1 (2023), pp. 19–41, doi:10.35878/alitimad.v1i1.725.

⁶² Aditya Alta, Rachma Auliya, and Azizah Nazzala Fauzi, 'Hambatan Dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan Dan Pertanian', *Makalah Kebijakan*, 54.54 (2023), p. 123.

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁶³

5) Perubahan Iklim Dan Kondisi Lingkungan Alam

Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, dan pertanian merupakan salah satu sektor yang paling rentan terkena pengaruhnya. Di Indonesia, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar penduduk bekerja di bidang ini. Menurut Nurdin, pertanian sangat sensitif terhadap perubahan iklim karena dapat memengaruhi pola dan waktu tanam, tingkat produksi, serta mutu hasil panen.

Faktor-faktor iklim seperti kenaikan suhu udara, perubahan pola curah hujan, tingkat penguapan, limpasan air, dan kelembapan tanah turut menentukan produktivitas pertanian. Selain itu, dampak perubahan iklim juga berimbas pada sistem pangan secara keseluruhan, mencakup aspek produksi, penyimpanan, distribusi, akses, hingga stabilitas harga pangan M. Burke & D. Lobell.⁶⁴

⁶³ Rubén Villodas, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN', 66 (2012), pp. 37–39.

⁶⁴ Khalista Arkania Harvian and Risni Juliaeni Yuhan, 'The Impact of Climate Change on Global Food Security', *Economic and Social Problems of Russia The Digital Economy Current State and Prospects*, 1, 2023, pp. 1052–61, doi:10.31249/espr/2023.01.09.

Lingkungan merupakan fenomena alam yang terdapat di sekitar manusia, tempat terjadinya interaksi antara faktor biotik (makhluk hidup) dan abiotik (benda tak hidup). Lingkungan memberikan berbagai rangsangan (stimulus) kepada individu, sementara individu pun memberikan tanggapan atau respons terhadap lingkungannya. Melalui interaksi tersebut, individu dapat mengalami perubahan, termasuk dalam pola perilaku. Menurut teori “kembali ke alam” yang dikemukakan oleh Hamalik, alam memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi perkembangan peserta didik.

Menurut Mohammad al-Toumy al-Syaibaniy, lingkungan diartikan sebagai suatu proses yang mengubah perilaku individu dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun hubungannya dengan alam sekitar. Perubahan tersebut terjadi melalui kegiatan pengajaran, yang dipandang sebagai aktivitas fundamental sekaligus bagian penting dari berbagai profesi dasar dalam masyarakat.

Menurut Zakiah Daradjat, lingkungan meliputi berbagai unsur seperti iklim, kondisi geografis, tempat tinggal, adat istiadat, tingkat pengetahuan, pendidikan, serta unsur alam. Dengan kata lain, lingkungan mencakup seluruh hal yang ada dan berkembang dalam kehidupan, baik yang berupa manusia, benda ciptaan manusia, maupun unsur alami yang bergerak serta berbagai peristiwa atau keadaan yang memiliki keterkaitan dengan individu.⁶⁵

⁶⁵ Kata Kunci, Lingkungan Alam, and Guru Profesional, ‘Pendidikan Agama Islam Stai Diniyah Pekanbaru’, | *Jurnal Kreatifitas*, 6 (2018), pp. 125–51.

6) Dinamika Sosial Dan Politik Di Pedesaan.

Dalam kajian sosiologi, dinamika sosial diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi pada seluruh elemen masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang senantiasa berkembang seiring waktu. Menurut Hamidah, dinamika sosial menunjukkan bahwa setiap masyarakat akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut berlangsung di setiap kelompok sosial, dengan laju yang berbeda ada yang berjalan lambat (*retrogresif*) dan ada pula yang berlangsung cepat progresif.

Menurut Baharrudin, terdapat beberapa bentuk dinamika sosial, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara perlahan, karena muncul dari dorongan internal suatu kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya perubahan dalam sistem komunikasi yang berkembang seiring waktu. Sebaliknya, perubahan revolusi terjadi secara cepat dan menimbulkan perubahan besar dalam masyarakat, yang umumnya disebabkan oleh adanya konflik atau gejolak sosial di dalamnya.⁶⁶

Politik di pedesaan merupakan segala bentuk kegiatan, kebijakan, dan interaksi kekuasaan yang terjadi di tingkat desa, baik antara masyarakat, pemerintah desa, maupun pemerintah pusat. Secara sederhana, politik pedesaan mencakup cara masyarakat desa mengatur, mengelola, dan merespons

⁶⁶ Sodik Fajri, 'Pendidikan Balaghah Dan Rumpun Spesifikasi Islami Dalam Bahasa Sehari-Hari', *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, 14.1 (2020), p. 1.

kekuasaan, kepemimpinan, serta kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Wasisto Raharjo Jati politik di pedesaan sering kali tidak terlepas dari pengaruh negara, karena desa sering dijadikan sebagai objek intervensi politik dan kebijakan publik. Pemerintah, baik pada masa kolonial maupun pascakemerdekaan, kerap menjadikan desa sebagai alat kekuasaan (instrumen politik top-down) untuk menjalankan kebijakan pusat.⁶⁷

Faktor eksternal berperan dalam membentuk peluang dan ancaman (*opportunities and threats*). Faktor ini berkaitan dengan berbagai kondisi di luar perusahaan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Aspek-aspek yang termasuk dalam faktor eksternal meliputi lingkungan industri serta lingkungan bisnis makro, seperti aspek ekonomi, politik, hukum, teknologi, demografi, dan sosial budaya.⁶⁸

Lingkungan eksternal merupakan seluruh faktor di luar organisasi yang dapat memengaruhi keberadaannya. Oleh karena itu, agar dapat beroperasi dan bersaing secara efektif, manajer perlu memahami lingkungan tersebut secara menyeluruh dan akurat. Untuk mengenali peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan, diperlukan analisis terhadap lingkungan eksternal, yaitu kondisi yang melingkupi organisasi dari luar.⁶⁹

⁶⁷ Wasisto Raharjo Jati, 'Globalisasi Dan Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi', *Jurnal Penelitian Politik*, 11.2 (2021), pp. 17–26 <<https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/198/82>>.

⁶⁸ Ibid., 42.

⁶⁹ Ibid., 1527

5. Kebijakan Pemerintah (Pupuk Subsidi)

Menurut Carl Friedrich, kebijakan merupakan suatu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada serta berupaya memanfaatkan peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁷⁰

Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian rencana, program, kegiatan, tindakan, keputusan, maupun sikap untuk bertindak atau tidak bertindak yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu sebagai langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Penetapan kebijakan menjadi faktor penting bagi suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya.

Menurut Thoha, kebijakan memiliki dua aspek penting, yaitu:

- a. Kebijakan dipandang sebagai praktik sosial, bukan peristiwa tunggal atau terpisah. Artinya, kebijakan lahir dari hasil perumusan pemerintah yang didasarkan pada berbagai peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tumbuh dari dinamika sosial dan tidak berdiri sendiri, terisolasi, ataupun asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan merupakan respons terhadap peristiwa yang terjadi, baik dalam rangka menciptakan keharmonisan di antara pihak yang berkonflik, maupun memberikan insentif bagi kerja sama kolektif, terutama bagi pihak-pihak yang mengalami perlakuan tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

⁷⁰ Arthur S. Link, *Wilson, Wilson*, 2015, II, doi:10.5840/thought1947224173.

Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus sebagai cara dalam memecahkan masalah melalui penggunaan sarana-sarana yang ada dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, kebijakan bersifat mendasar karena hanya memberikan garis besar sebagai pedoman umum yang menjadi landasan tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷¹

Oleh karena itu Kebijakan pupuk subsidi merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban biaya produksi petani dengan menyediakan pupuk bersubsidi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani menggambarkan suatu kondisi di mana petani hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan tenteram, serta terbebas dari rasa iri atau kesenjangan sosial di lingkungan masyarakatnya.

Sejak tahun 1969, kebijakan subsidi pupuk telah menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan subsidi sektor pertanian di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan dari pandangan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pemberian subsidi membuat harga pupuk menjadi lebih terjangkau, sehingga dapat mendorong peningkatan penggunaan input tersebut oleh para petani (PSE-KP, 2009).⁷²

⁷¹ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, pp. 1–12, doi:10.1109/ICMENS.2005.96.

⁷² Dahlia Nauli, 'Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Produsen Dan Konsumen Beras Di Indonesia', *Jurnal Agrosains Dan Teknologi*, 4.1 (2019), pp. 40–55, doi:10.24853/jat.4.1.40-55.

Dalam konteks pembangunan pertanian, pupuk memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem usahatani. Hadi, menjelaskan bahwa pupuk merupakan salah satu input yang sangat vital dalam proses produksi pertanian. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya pupuk, pemanfaatan input lain seperti benih unggul, air, maupun tenaga kerja hanya akan memberikan hasil yang terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani.⁷³

Pupuk bersubsidi merupakan jenis pupuk yang pengadaan dan pendistribusiannya diatur dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta hanya disalurkan melalui pengecer resmi yang berada di Lini IV. Lini IV sendiri merujuk pada tempat penyimpanan atau kios pengecer yang berada di tingkat kecamatan atau desa, yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pihak distributor.

Permentan Nomor 06/permentan/SR.130/2/2011 mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi. Berikut kutipannya

- 1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011
- 2) Alokasi pupuk bersubsidi tersebut dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, subsector, dan sebaran bulan. Alokasi tersebut dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur paling lambat ditetapkan pada awal bulan Maret 2011.

⁷³ Valeriana Darwis and NFN Supriyati, 'Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11.1 (2016), p. 45, doi:10.21082/akp.v11n1.2013.45-60.

Kemudian dirinci lebih lanjut menurut kecamatan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Wali kota paling lambat akhir maret 2011

- 3) Alokasi pupuk bersubsidi tersebut memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, budi daya ikan dan/udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyaluran atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan
- 4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan budidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau krmampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
- 5) Jika terjadi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk subsidi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dapat dipenuhi melalui realokasi antarwilayah, waktu dan subsector. Realokasi antar kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan realokasi antarkecamatan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- 6) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat
- 7) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan bulan berjalan tiidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui 1 (satu) tahun.⁷⁴

⁷⁴ Indriasari and Sani, 'Pengendalian Manajemen Pupuk Subsidi'.

a. Penjual Atau Pengecer Pupuk

Dalam proses distribusi pupuk bersubsidi, ketentuannya adalah distributor menunjuk kios pengecer, dan pupuk tersebut dibeli oleh petani yang terdaftar melalui RDKK. Namun, aturan ini tidak sepenuhnya diterapkan di semua daerah. misalnya, kios pengecer ditentukan oleh kelompok tani. Pada tahun 2008, kelangkaan pupuk memicu aksi demonstrasi petani di gedung DPRD. Hasil dari unjuk rasa tersebut menghasilkan keputusan bahwa kelompok tani diberikan kebebasan untuk memilih kios yang mereka percayai sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi⁷⁵.

Kebijakan subsidi pupuk diukur berdasarkan empat indikator utama: harga, jenis, waktu, dan jumlah. Dari keempat indikator tersebut, tiga di antaranya jenis, waktu, dan jumlah dapat dianggap efektif. Namun, indikator harga belum dapat dikategorikan efektif karena masih terdapat kesenjangan harga pada pupuk bersubsidi yang diterima petani. Di Lini III (distributor), pupuk subsidi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada Lini IV (kios resmi) akibat adanya biaya tambahan untuk transportasi dan bongkar muat. Kondisi ini menyebabkan pengecer juga menjual pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga yang melebihi HET⁷⁶.

b. Tujuan Distribusi Pupuk Subsidi

Subsidi pupuk disalurkan dalam bentuk pendanaan yang menutupi selisih antara biaya produksi pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk petani.

⁷⁵ Darwis and Supriyati, 'Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya'.

⁷⁶ Nini Rigi, Syahyana Raessi, and Rafnel Azhari, 'Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok', *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 1.3 (2019), pp. 75–83, doi:10.25077/joseta.v1i3.184.

Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai dua hal: (1) tujuan jangka pendek, yakni meningkatkan daya beli petani agar mereka dapat membeli pupuk sesuai dengan dosis pemupukan berimbang yang disesuaikan dengan kondisi lokasi; dan (2) tujuan jangka panjang, yaitu mendorong peningkatan produktivitas serta hasil pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.⁷⁷

6. Kesejahteraan Ekonomi Syariah

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan sejati terwujud melalui tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri berarti terjaganya tujuan syariat (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia hanya akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan batin ketika kesejahteraan yang hakiki tercapai bagi seluruh umat manusia, baik dalam aspek spiritual maupun material. Untuk merealisasikan tujuan syariat tersebut, al-Ghazali menjelaskan bahwa sumber utama kesejahteraan terletak pada terpeliharanya lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁸

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), dengan tujuan utama syariatnya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat Islam ditetapkan sepenuhnya untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Senada dengan itu, Yusuf al-Qardhawi juga menyatakan bahwa di mana terdapat kemaslahatan, di situlah hukum Allah berada.⁷⁹

⁷⁷ Darwis and Supriyati, 'Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya'.

⁷⁸ An'im Fattach, 'Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam', *Jurnal Manajemen*, 3.2 (2018), p. 728, doi:10.30736/jpim.v3i2.179.

⁷⁹ Fadlan Fadlan, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, pp. 1–22.

Pernyataan tersebut menunjukkan dengan jelas betapa eratnya keterkaitan antara Syariat Islam dan kemaslahatan. Ekonomi Islam, sebagai salah satu cabang dari Syariat Islam, memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan utama syariat itu sendiri. Sasaran utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (*falah*), serta menciptakan kehidupan yang layak, baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Konsep ini menjadi landasan pengertian kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang secara mendasar berbeda dari konsep kesejahteraan dalam sistem ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan materialistis.⁸⁰

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan merupakan kondisi keberuntungan seseorang yang memperoleh rezeki halal dan mencukupi, disertai terpenuhinya kebutuhan spiritual bagi seluruh anggota keluarganya serta memiliki sikap *qana'ah* atau rasa puas atas apa yang diterima. Para ulama dan mufasir menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan Islami meliputi terpenuhinya kebutuhan fisik dari sumber rezeki yang halal, kesehatan jasmani dan rohani, keberkahan dalam rezeki, terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, adanya rasa kasih sayang antar sesama, serta sikap *ridha* dan *qana'ah* terhadap pemberian Allah yang menumbuhkan kebahagiaan. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari tercukupinya kebutuhan fisik dan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan spiritual.⁸¹

⁸⁰ Ibid., 7-8.

⁸¹ Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, 'Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam mencakup dua makna utama yaitu:

- 1) Kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang mencakup terpenuhinya kebutuhan material sekaligus spiritual, baik pada tingkat individu maupun sosial. Karena manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, maka kebahagiaan sejati harus mencakup keseimbangan antara keduanya. Demikian pula, manusia memiliki dimensi pribadi dan sosial yang saling berkaitan; seseorang akan mencapai kebahagiaan apabila tercipta harmoni antara dirinya dengan lingkungan sosial tempat ia hidup.
- 2) Kesejahteraan dalam pandangan Islam mencakup kehidupan dunia dan akhirat (*falah*), karena manusia tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga akan melanjutkan kehidupan di akhirat setelah dunia berakhir. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Namun, apabila keseimbangan ideal antara keduanya tidak tercapai, maka kesejahteraan di akhirat menjadi prioritas utama, karena kehidupan di sana bersifat abadi dan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kehidupan dunia.⁸²

Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), p. 3476, doi:10.29040/jiei.v8i3.6594.

⁸² Ziauddin Sardar and Muhammad Nafik H.R, 'Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3.5 (2017), p. 391, doi:10.20473/vol3iss20165pp391-401.

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi yang menyeluruh, meliputi aspek material dan spiritual sekaligus. Ukuran kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada indikator ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, spiritual, serta sosial. Dengan demikian, konsep kesejahteraan dalam Islam memiliki makna yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pandangan ekonomi konvensional.⁸³

a. Prinsip Ekonomi Islam

Secara umum, Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama. Salah satunya adalah prinsip tauhid, yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi dijalankan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, tujuan utama dalam berusaha tidak hanya berfokus pada keuntungan materi atau kepentingan pribadi, melainkan juga pada upaya meraih keridhaan Allah SWT serta kepuasan spiritual dan sosial.

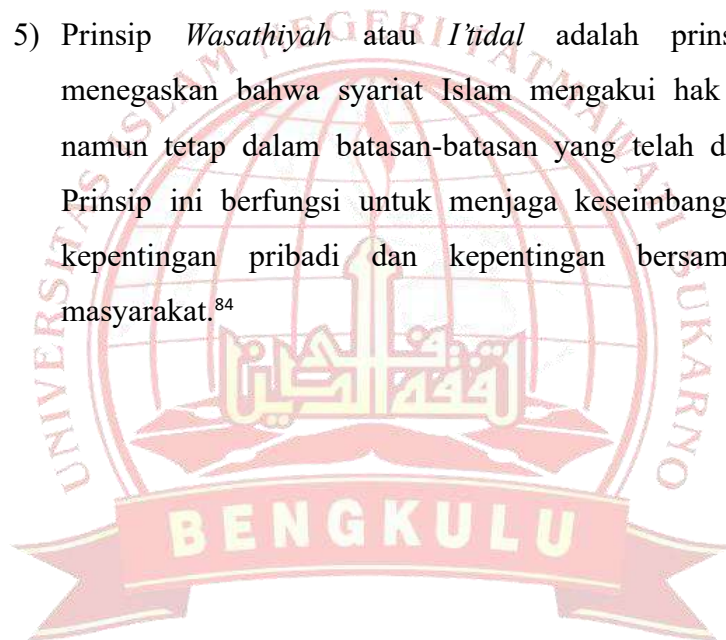
Menurut Sjaechul Hadi Poernomo, dijelaskan bahwa terdapat sejumlah prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam.

- 1) Prinsip keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana ALLAH SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia
- 2) Prinsip *al-ihsan*, prinsip *al-ihsan* adalah berbuat kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain
- 3) Prinsip *Al-Kifayah*, merujuk pada konsep kecukupan. Inti dari prinsip ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan serta

⁸³ Ibid., 396

memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat.

- 4) Prinsip *Al-Mas'uliyah* merupakan prinsip tanggung jawab yang mencakup berbagai dimensi, termasuk tanggung jawab antarindividu (*mas'uliyah al-afrad*) serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*)
- 5) Prinsip *Wasathiyah* atau *I'tidal* adalah prinsip yang menegaskan bahwa syariat Islam mengakui hak individu, namun tetap dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam masyarakat.⁸⁴



⁸⁴ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori-teori berhubungan dengan berbagai aspek yang telah diidentifikasi dalam penelitian. Kerangka berpikir menjadi landasan pemikiran yang disusun berdasarkan hasil sintesis dari fakta empiris, observasi lapangan, serta kajian literatur. Di dalamnya termuat teori-teori, dalil, dan konsep-konsep yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir juga menjelaskan hubungan serta keterkaitan antar variabel yang dikaji. Umumnya, kerangka berpikir disajikan dalam bentuk bagan atau skema yang menggambarkan alur logika peneliti serta hubungan antar variabel yang diteliti. Representasi visual ini sering disebut sebagai paradigma atau model penelitian. Dalam menyusun kerangka berpikir yang baik, peneliti perlu memperhatikan sejumlah hal penting agar struktur pemikirannya logis, sistematis, dan mendukung tujuan penelitian.⁸⁵

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pupuk Subsidi Pemerintah

Bagian ini menjadi dasar permasalahan. Kebijakan tersebut menjadi titik awal penelitian, karena di sinilah muncul isu distribusi, keterjangkauan, serta efektivitas pupuk subsidi bagi petani.

Kebijakan pupuk subsidi pemerintah merupakan bentuk kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Menurut Dunn, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk

⁸⁵ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, 'Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif', *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2.1 (2023), pp. 160–66.

memecahkan masalah publik. Dalam konteks pertanian, subsidi pupuk merupakan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas produksi dan harga pangan.⁸⁶

2. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)

Tahap ini adalah alat analisis utama. Penelitian menilai kebijakan pupuk subsidi dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil SWOT ini menjadi pijakan untuk memahami kondisi nyata kebijakan di lapangan.

Analisis SWOT digunakan sebagai alat analisis strategis untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal suatu kebijakan atau organisasi. Menurut David, analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna merumuskan strategi yang tepat. Dalam penelitian ini, SWOT digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pupuk subsidi dari perspektif strategis dan implementatif.⁸⁷

3. Perspektif Ekonomi Syariah

Bagian ini adalah kerangka penilaian normatif. Kebijakan pupuk subsidi dikaji berdasarkan prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), larangan eksploitasi, dan keseimbangan. Tujuannya untuk melihat apakah kebijakan sudah sesuai dengan nilai Islam.

Perspektif ekonomi syariah digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kebijakan pupuk subsidi berdasarkan nilai Islam. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam bertujuan

⁸⁶ Willian N. Dunn, *Public Policy Analysis*, 5th edn (Routledge, 2016).

⁸⁷ David. F. R, *Strategic Management: Concepts and Cases*. (Prentice Hall, 2011).

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan (masalah), dan keseimbangan ekonomi dengan menghindari eksploitasi.⁸⁸

Dari perspektif ekonomi syariah hambatan tersebut akan dikaji melalui prinsip-prinsip seperti:

- a. *Al-adl* (keadilan). Melihat apakah dalam penyaluran pupuk tersebut sudah adil bagi petani
- b. *Al-mas`uliyah* (pertanggungjawaban). Konsep tanggung jawab dan akuntabilitas dalam Islam menekankan amanah pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik.
- c. *Al-ikhsan* (etika pelayanan) melihat pelayanan sudah sesuai terhadap etika ekonomi syariah.

4. Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani

Dari analisis SWOT dan tinjauan syariah, kerangka berpikir diarahkan pada hasil akhir, yaitu sejauh mana kebijakan pupuk subsidi berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Dampak yang dicakup antara lain peningkatan pendapatan dan produksi, ketersediaan pangan dan stabilitas ekonomi petani.

Kesejahteraan petani dianalisis sebagai output kebijakan publik. Menurut Todaro dan Smith, kesejahteraan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan akses terhadap kebutuhan dasar.⁸⁹

5. Kesimpulan & Saran

Bagian terakhir dari kerangka berpikir. Ini berfungsi untuk merangkum hasil analisis sekaligus memberikan rekomendasi agar kebijakan pupuk subsidi lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai syariah.

⁸⁸ Chapra. M. U, *Islam and the Economic Challenge*. (International Institute Of Islamic Thought (IIIT), 1992).

⁸⁹ S. C Todaro, M. P., & Smith, *Economic Development* (Pearson Education, 2009).

Menurut Dunn, rekomendasi kebijakan merupakan tahap akhir analisis kebijakan untuk memberikan solusi perbaikan kebijakan publik.⁹⁰



⁹⁰ Dunn, *Public Policy Analysis*.

Gambar 2.1
Diagram Kerangka Berfikir

